

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN
DIREKTORAT KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

NOTA DINAS

NOMOR: T/102/HM.02.07/VII/2020

Yth. : Direktur Hukum
Dari : Direktur Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Hal : Permohonan Rancangan/Draft Peraturan Kepala PPATK
tentang Perubahan Ketiga Klasifikasi Informasi
Lampiran : -
Tanggal : 7 Juli 2020

Sehubungan dengan ketentuan Layanan Keterbukaan Informasi tentang pembaharuan Klasifikasi Informasi PPATK, dengan ini kami memohon bantuan review dan persetujuan untuk perubahan dan pembaharuan data klasifikasi informasi tersebut. Dokumen rancangan terlampir bersama Nota Dinas ini.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Salman

PERATURAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR: PER-XX/XX/XXXXX/XX/XXXX

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA TERHADAP PERATURAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR: PER-17/ 1.01/PPATK/11/15 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA

KLASIFIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI PADA

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang
- a. bahwa Kepala PPATK telah menerbitkan peraturan no. Per3/2014 tentang Pola Klasifikasi Arsip yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Kearsipan dan Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. bahwa metode pengklasifikasian informasi pada peraturan Kepala Nomor PER-II/ 1.01/PPATK/08/ 14 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kepala PPATK nomor: PER-11/1.01/PPATK/08/14 tidak sesuai dengan peraturan Kepala PPATK nomor: PER-03/1.01/PPATK/03/14 tentang Pola Klasifikasi Arsip PPATK
 - c. bahwa metode pengklasifikasian arsip dan metode pengklasifikasian informasi perlu disinkronisasi sehingga tidak bertentangan satu sama lain.
 - d. bahwa klasifikasi dan pengelolaan informasi pada PPATK perlu menyesuaikan dengan peraturan Kepala PPATK nomor: PER-03/1.01/PPATK/03/14 tentang Pola Klasifikasi Arsip
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110);
4. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-07/ 1.01/PPATK/08/ 12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 817);
5. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-03/1.01/PPATK/03/14 tentang Pola Klasifikasi Arsip PPATK
6. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-07/1.03/PPATK/07/14 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-08/1.02/PPATK/07/14 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
10. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.01/PPATK/08/14

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER-17/ 1.01/PPATK/11/15 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KLASIFIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

Pasal I

Lampiran Peraturan Kepala PER-17/ 1.01/PPATK/11/15 tentang Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi diubah seluruhnya sehingga menjadi sebagaimana lampiran dalam Peraturan Kepala ini.

Pasal II

Daftar Informasi Publik adalah seluruh informasi yang memiliki klasifikasi terbuka sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala PPATK.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

KEPALA PPATK

DIAN EDIANA RAE

| NO. | KODE KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | DASAR PENGECEUALIAN INFORMASI | | KONSEKUENSI PERTIMBANGAN | | JANGKA WAKTU | |
|----------|------------------|---|---|--|--------------------------|----------|---|---------|
| | | | | | TERBUKA | TERTUTUP | AKTIF | INAKTIF |
| F | KP | KEPEGAWAIAN | | | | | | |
| 1 | KP.01 | Formasi Pegawai | | | | | | |
| 2 | KP.01.01 | Usulan Formasi Pegawai | | | | | | |
| | | - Usulan dari Unit Kerja | | | Terbuka | | 2 tahun setelah tahun anggaran | 3 tahun |
| | | - Usulan Permintaan Formasi kepada MenPAN dan RB dan Kepala BKN | | | Terbuka | | | |
| 3 | KP.01.02 | Persetujuan Formasi Pegawai | | | | | | |
| | | - Persetujuan Menpan dan RB dan Penetapan Formasi | | | Terbuka | | 2 tahun setelah tahun anggaran | 3 tahun |
| 4 | KP.02 | Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai | | | | | | |
| 5 | KP.02.01 | Pegawai Tetap | | | | | | |
| | | - Proses Penerimaan Pegawai meliputi : Pengumuman, Seleksi Administrasi, Pemanggilan Peserta Test, Pelaksanaan Ujian Tertulis, Keputusan Hasil Ujian, Wawancara | | | Terbuka | | 2 tahun setelah semua diangkat | 2 tahun |
| | | - Penetapan Pengumuman Kelulusan | | | Terbuka | | 2 tahun setelah semua diangkat PNS | 2 tahun |
| | | - Berkas Lamaran yang Tidak Diterima | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir | - |
| | | - Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | - | - |
| | | - Nota Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih dari 2 tahun | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 1 tahun setelah SK ditetapkan | 2 tahun |
| | | - SK CPNS dan PNS Kolektif | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun setelah petikan SK ditetapkan | 3 tahun |
| 6 | KP.02.02 | Pegawai Dipekerjakan | | | | | | |
| | | - Proses Penerimaan Pegawai meliputi : Pengumuman, Seleksi Administrasi, Pemanggilan Peserta Test, Pelaksanaan Ujian Tertulis, Keputusan Hasil Ujian, Wawancara | | | Terbuka | | 2 tahun setelah semua diangkat | 2 tahun |
| | | - SK Pengangkatan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun setelah petikan SK ditetapkan | 3 tahun |
| 7 | KP.02.03 | Pegawai Kontrak | | | | | | |
| | | - Proses Penerimaan Pegawai meliputi : Pengumuman, Seleksi Administrasi, Pemanggilan Peserta Test, Pelaksanaan Ujian Tertulis, Keputusan Hasil Ujian, Wawancara | | | Terbuka | | 2 tahun setelah semua diangkat | 2 tahun |
| | | - Penetapan Pengumuman Kelulusan | | | terbuka | | 2 tahun setelah semua diangkat | 2 tahun |
| | | - Berkas Lamaran yang Tidak Diterima | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 1 tahun setelah kontrak ditetapkan | - |
| | | - Kontrak Pegawai | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun setelah kontrak ditetapkan | 3 tahun |
| 8 | KP.03 | Pembinaan Karier Pegawai | | | | | | |
| 9 | KP.03.01 | Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | |
| | | - Usulan Diklat/kursus/Magang | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | | |
| | | - Izin Belajar (ST, SK, Surat Izin) | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | | |
| | | - Ujian Dinas | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 4 tahun setelah SK ditetapkan | 2 tahun |
| | | - Laporan Kegiatan Pengembangan Diri | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | | |
| | | - STTPL (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan) | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | | |
| 10 | KP.03.02 | Penilaian Pegawai | | | | | | |
| | | - IDP3 | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | | |
| | | - SKP | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun setelah SK ditetapkan | 3 tahun |
| | | - Penilaian pegawai dipekerjakan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | | |
| | | - Penilaian pegawai kontrak | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | | |
| 11 | KP.03.03 | Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) | | | | | | |
| | | - Berkas DUPAK | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun anggaran berjalan | 3 tahun |
| 12 | KP.03.04 | Disiplin Pegawai | | | | | | |
| | | - Daftar hadir pegawai beserta rekapitulasinya | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 1 tahun setelah anggaran berakhir | 2 tahun |
| | | - Surat keberatan atas absensi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | | |

| | | | | | | | |
|----|----------|---|---|--|----------|-----------------------------------|---------|
| 13 | KP.03.05 | Hukuman Disiplin/Sanksi | | | | | |
| | | - Berkas hukuman disiplin atau sanksi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah anggaran berakhir | 2 tahun |
| | | - Pengajuan keberatan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | - Evaluasi atas keberatan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | - Penetapan keputusan atas keberatan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | - Rekapitulasi Pegawai yang Terkena Hukuman Disiplin | | | Terbuka | | |
| 14 | KP.03.06 | Penghargaan dan Tanda Jasa | | | | | |
| | | - Berkas penghargaan dan tanda jasa | | | Terbuka | 2 tahun setelah SK ditetapkan | 2 tahun |
| 15 | KP.04 | Mutasi | | | | | |
| 16 | KP.04.01 | Kenaikan Gaji, Tunjangan Khusus, dan Honorarium | | | | | |
| | | - Dokumen pengajuan kenaikan gaji, tunjangan khusus, dan honorarium | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah SK ditetapkan | 2 tahun |
| 17 | KP.04.02 | Kepangkatan | | | | | |
| | | - Dokumen pengajuan kenaikan pangkat/golongan/jabatan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah SK ditetapkan | 2 tahun |
| 18 | KP.04.03 | Perpindahan | | | | | |
| | | - Berkas perpindahan pegawai antar unit kerja/alih status/dipekerjakan pada instansi lain | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah SK ditetapkan | 2 tahun |
| 19 | KP.04.04 | Perubahan Data Keluarga | | | | | |
| | | - Surat izin pernikahan/perceraian | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | - | - |
| | | - Penolakan izin pernikahan/perceraian | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | - Surat nikah/cerai | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | - Akte kelahiran anak | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | - Surat keterangan kematian | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| 20 | KP.04.05 | Pengangkatan/Pemberhentian Jabatan Struktural dan/ atau | | | | | |
| | | - Berkas usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural dan Fungsional | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah SK ditetapkan | 2 tahun |
| 21 | KP.04.06 | Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/ Kedudukan Hukum Pegawai | | | | | |
| | | - Berkas usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/ Kedudukan Hukum Pegawai | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah SK ditetapkan | 2 tahun |
| 22 | KP.04.07 | Peninjauan Masa Kerja | | | | | |
| | | - Berkas peninjauan masa kerja | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah SK ditetapkan | 2 tahun |
| 23 | KP.04.08 | Komite SDM | | | | | |
| | | - Undangan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | - Risalah Rapat | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | - Daftar Hadir | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| 24 | KP.05 | Kesejahteraan Pegawai | | | | | |
| 25 | KP.05.01 | Kesehatan | | | | | |
| | | - Berkas tentang layanan pemeliharaan kesehatan pegawai beserta asuransi | | | Terbuka | 2 tahun | - |
| 26 | KP.05.02 | Material/Spiritual | | | | | |
| | | - Berkas tentang layanan bantuan sosial, olah raga, rekreasi, pakaian dinas, pengurusan jenazah | | | Terbuka | 2 tahun | - |
| 27 | KP.05.03 | Taspen/Taperum | | | | | |
| | | - Berkas tentang layanan Taspen dan Taperum | | | Terbuka | 2 tahun | - |
| 28 | KP.06 | Pemberhentian dan Pensiun | | | | | |
| 29 | KP.06.01 | Pemberhentian | | | | | |
| | | - Usul pemberhentian pegawai/janda/duda dan Pegawai tanpa hak pensiun | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah SK ditetapkan | 2 tahun |

| | | | | | | | |
|----|----------|---|---|--|----------|--------------------------------------|--|
| 30 | KP.06.02 | Pensiun | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | | |
| | | - Usul penetapan pegawai/janda/duda dan PNS yang tewas | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah SK ditetapkan | 2 tahun |
| 31 | KP.07 | Administrasi Pegawai | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | | |
| 32 | KP.07.01 | Surat Tugas/perintah dinas | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | | |
| | | - Dokumen surat tugas/perjalanan dinas | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah pelaksanaan | 2 tahun |
| 33 | KP.07.02 | Cuti Pegawai/Izin | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | | |
| | | - Cuti tahunan/bersalin/alasan penting | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah pelaksanaan | 2 tahun |
| | | - Cuti Besar | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah pelaksanaan | - |
| | | - Cuti Diluar Tanggungan Negara | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah pelaksanaan | 2 tahun |
| | | - Surat Keterangan Sakit | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah pelaksanaan | |
| | | - Surat izin tidak masuk kerja | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah pelaksanaan | 2 tahun |
| 34 | KP.07.03 | Dokumentasi Identitas Pegawai | | | | | |
| | | - Usul penetapan karpeg | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah identitas ditetapkan | 2 tahun |
| | | - KPE | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | - Karis dan Karsu | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | - Keanggotaan dalam organisasi profesi/kedinasan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | - LP2P (Laporan Pajak-pajak Pribadi) | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | - KP4 | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| 35 | KP.07.04 | Berkas Kepegawaian dan DUK | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | | |
| | | - Berkas Kepegawaian | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | - DUK | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| 36 | KP.08 | Perselisihan/Sengketa Pegawai | | | | | |
| | | - Berkas atas adanya sengketa pegawai | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah memperoleh | 2 tahun setelah hak dan kewajiban berakhir |
| 37 | KP.09 | Berkas Perorangan Pegawai | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | | |
| | | - Berkas Lamaran CPNS yang diterima | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah berhenti/pensiun | 2 tahun setelah hak dan kewajibannya habis |
| | | - Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | - Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | - SK Pengangkatan CPNS | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | - Hasil Pengujian Kesehatan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | - SK Pengangkatan PNS | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | - SK Peninjauan Masa Kerja | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | - SK Kenaikkan Pangkat | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | - SK Pengangkatan dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | - SK Perpindahan Wilayah Kerja | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|----------|
| | | - SK Perpindahan Antar Instansi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN) | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - Berita Acara Pemeriksaan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - SK Pemberian Uang Tunggu | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - SK Pengalihan PNS | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - SK Pemberhentian sebagai PNS | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - SK Pemberhentian Sementara (sebagai CPNS, PNS, Jabatan Struktural, dan Jabatan Fungsional) | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - Surat Keterangan Pernyataan Hilang | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - SK Penggantian Nama | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - Surat perbaikan Tanggal tahun Kelahiran | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - Akta Nikah/Cerai | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - Akta Kelahiran | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - Isian Formulir PUPNS | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - Surat Permohonan netralitas PNS | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - Surat Keterangan Mutasi Keluarga | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - Surat Keterangan Meninggal Dunia | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - Ijazah/Sertifikat | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - SK Penempatan/Penarikan Pegawai | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - Surat Pertimbangan Status PNS | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |
| | | - Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup |

| | | | | | | | |
|----------|-----------|--|---|---------|----------|----------------------|---------|
| | | - SK Pensiun | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| G | OT | ORGANISASI DAN TATA LAKSANA | | | | | |
| 1 | OT.01 | Kelembagaan | | | | | |
| 2 | OT.01.01 | Struktur Organisasi | | | | | |
| | | - Bagun struktur organisasi | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| 3 | OT.01.02 | Pengembangan Organisasi | | | | | |
| | | - Hasil kajian restrukturisasi organisasi | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Laporan evaluasi organisasi | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| 4 | OT.01.03 | Tata Kerja Unit Kerja | | | | | |
| | | - Identifikasi tugas pokok dan fungsi | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Peta tugas dan fungsi organisasi | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| 5 | OT.02 | Penataan Jabatan SDM Aparatur | | | | | |
| 6 | OT.02.01 | Analisis Jabatan | | | | | |
| | | - Identitas Jabatan | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Uraian Jabatan | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Syarat Jabatan | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Laporan Hasil Analisis Jabatan | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| 7 | OT.02.02 | Analisis Beban Kerja | | | | | |
| | | - Perhitungan Beban Kerja | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Waktu Kerja Efektif | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Standar Norma Waktu | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Laporan Hasil Analisis Beban Kerja | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| 8 | OT.02.03 | Peta Jabatan | | | | | |
| | | - Peta Jabatan | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 tahun | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Data Bezzeting Pegawai | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| 9 | OT.02.04 | Evaluasi Jabatan | | | | | |
| | | - Informasi Jabatan | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Form Informasi Faktor Jabatan | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Daftar Kelas Jabatan | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Laporan Hasil Evaluasi Jabatan | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| 10 | OT.02.05 | Kajian Jabatan | | | | | |
| | | - Daftar inventarisasi jabatan fungsional dan struktural PPATK | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Laporan kajian jabatan fungsional | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Matrik Penyetaraan Jenjang Kepangkatan | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Naskah Akademik Jabatan Fungsional Tertentu PPATK | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| 11 | OT.02.06 | Standar Kompetensi | | | | | |
| | | - Dokumen standar kompetensi jabatan | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| 12 | OT.03 | Tata Laksana | | | | | |
| 13 | OT.03.01 | Prosedur dan Metode Kerja | | | | | |
| | | - Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Kerja | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - SOP Link | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - SOP Unggulan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - SOP Layanan | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Matrik Identifikasi SOP | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | selama masih berlaku | 5 tahun |
| 14 | OT.03.02 | Pedoman Pelaksanaan Kerja (<i>Manual Instruction</i>) | | | | | |
| | | - Buku Manual Kepegawaian | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| 15 | OT.03.03 | Monitoring dan Evaluasi Prosedur, Metode Kerja dan Pedoman | | | | | |
| | | - Matrik Monitoring SOP | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Matrik Evaluasi SOP | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | selama masih berlaku | 5 tahun |
| 16 | OT.04 | Penguatan Manajemen | | | | | |
| 17 | OT.04.01 | Sistem Pengendalian Intern | | | | | |
| | | - Pedoman/Petunjuk Teknis Sistem Pengendalian Intern PPATK | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Pemetaan Unsur-unsur SPI PPATK | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Kuesioner Implementasi SPI | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Laporan Pelaksanaan SPI PPATK | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| 18 | OT.04.02 | Manajemen Risiko | | | | | |
| | | - Pedoman/Petunjuk Teknis Manajemen Risiko PPATK | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |

| | | | | | | | |
|----|----------|---|---|---------|----------|----------------------|---------|
| | | - Matrik Identifikasi Risiko | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Laporan Hasil Asesmen Risiko PPATK | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | selama masih berlaku | 5 tahun |
| 19 | OT.04.03 | <i>Good Governance</i> | | | | | |
| | | - Pedoman/Petunjuk Teknis Good Governance PPATK | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Kuesioner Good Governance | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Laporan Pelaksanaan Good Governance | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| 20 | OT.04.04 | Reformasi Birokrasi | | | | | |
| | | - Road Map Reformasi Birokrasi PPATK | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi PPATK | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |
| | | - Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi PPATK | | Terbuka | | selama masih berlaku | 5 tahun |

| NO. | KODE KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | DASAR PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI PERTIMBANGAN | | JANGKA WAKTU | |
|-----|---------------------|---|---|--------------------------|----------|---|---------|
| | | | | TERBUKA | TERTUTUP | AKTIF | INAKTIF |
| E | KU | KEUANGAN | | | | | |
| 1 | KU.01 | Perencanaan dan Penganggaran | | | | | |
| 2 | KU.01.01 | Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) | | Terbuka | | Selama masih berlaku | 4 tahun |
| 3 | KU.01.02 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) | | Terbuka | | Selama masih berlaku | 4 tahun |
| 4 | KU.01.03 | a. Rencana Strategis | | Terbuka | | Selama masih berlaku | 4 tahun |
| | | b. Dokumen Renstra Eselon II | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah masa renstra berakhir | 3 tahun |
| | | c. Dokumen Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah masa renstra berakhir | 3 tahun |
| 5 | KU.01.04 | Rencana Kerja | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | | |
| | | a. Dokumen Trilateral | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 4 tahun |
| | | b. Dokumen Renja | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 4 tahun |
| | | c. Pagu Indikatif | | Terbuka | | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 4 tahun |
| 6 | KU.01.05 | Rencana Kerja dan Anggaran | | | | | |
| | | a. Pagu Sementara | | Terbuka | | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 4 tahun |
| | | b. Pagu Definitif | | Terbuka | | | |
| | | c. KAK/TOR | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 4 tahun |
| | | d. RAB | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 4 tahun |
| | | e. SP-RKA-KL | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 4 tahun |
| | | f. RKA-KL | | | | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 4 tahun |

| | | | | | | | |
|----|----------|--|---|--|----------|---|---------|
| | | g. DIPA | | | Terbuka | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 4 tahun |
| | | h. POK awal dan POK revisi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 4 tahun |
| | | i. Bahan Dengar Pendapat/Raker Anggaran dengan DPR-RI | | | Terbuka | | |
| | | j. Target penerimaan negara bukan pajak | | | Terbuka | | |
| 7 | KU.01.06 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran | | | | | |
| | | a. Laporan Evaluasi Pelaksanaan program dan anggaran | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah tahun anggarannya berakhir | 4 tahun |
| | | b. Laporan Capaian Kinerja | | | | | |
| | | - Laporan Target dan Realisasi Kinerja | | | Terbuka | | |
| | | - Laporan Penjelasan Capaian | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | c. Laporan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| 8 | KU.01.07 | Evaluasi Perencanaan Kinerja | | | | | |
| | | a. Evaluasi Perencanaan Kinerja Unit Kerja | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | b. Evaluasi Perencanaan Kinerja PPATK | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| 9 | KU.02 | Pelaksanaan Anggaran | | | | | |
| 10 | KU.02.01 | Belanja Pegawai | | | | | |
| | | - Daftar Pembayaran Gaji dan Tunjangan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan | 3 tahun |
| | | - Daftar Pembayaran Tunjangan Khusus | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan | 3 tahun |
| | | - Daftar Pembayaran Uang Makan PNS | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan | 3 tahun |
| | | - Daftar Pembayaran Honor Pegawai Kontrak | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan | 3 tahun |
| | | - Daftar Pembayaran Lembur | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan | 3 tahun |

| | | | | | | | |
|----|----------|---|---|--|----------|---|---------|
| | | - Daftar Pembayaran Honor/Vakasi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan | 3 tahun |
| | | - Kartu Gaji dan Tunjangan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan | 3 tahun |
| | | - SPP, SPM, SP2D belanja pegawai | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan | 3 tahun |
| 11 | KU.02.02 | Belanja Barang | | | | | |
| | | - Dokumen belanja operasional sehari-hari perkantoran | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 3 tahun |
| | | - Dokumen belanja perjalanan dinas | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 3 tahun |
| | | - Dokumen belanja jasa (profesi/konsultan/sewa/lainnya) | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 3 tahun |
| | | - Dokumen belanja barang non operasional | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 3 tahun |

| | | | | | | | |
|----|----------|---|---|--|----------|---|---------|
| | | - Dokumen belanja barang lainnya | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 3 tahun |
| | | - SPP, SPM, SP2D belanja barang | | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 3 tahun |
| 12 | KU.02.03 | Belanja Modal | | | | | |
| | | a. Dokumen belanja barang inventaris kantor | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 5 tahun |
| | | b. Dokumen belanja peralatan dan mesin | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 5 tahun |
| | | c. Dokumen belanja gedung dan bangunan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 5 tahun |
| | | d. Dokumen belanja tanah | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 5 tahun |

| | | | | | | | | |
|----|----------|-------------------------------|---|---|--|----------|---|---------|
| | | e. | Dokumen belanja modal lainnya | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 5 tahun |
| | | f. | SPP, SPM, SP2D belanja modal | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 5 tahun |
| 13 | KU.03 | Penerimaan | | | | | | |
| 14 | KU.03.01 | Pajak | | | | | | |
| | | a. | Surat Setoran Pajak Penghasilan (PPh) | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 8 tahun |
| | | b. | Surat Setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| 15 | KU.03.02 | Penerimaan Negara Bukan Pajak | | | | | | |
| | | a. | Surat Setoran Bukan Pajak | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 8 tahun |

| | | | | | | | |
|----|-------|---|---|--|----------|---|---------|
| | | b. Surat Setoran Pengembalian Belanja | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 5 tahun |
| | | c. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 5 tahun |
| | | d. Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 5 tahun |
| 16 | KU.04 | Pembukuan | | | | | |
| | | - Buku Kas Umum | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut pemeriksaan selesai | 5 tahun |
| | | - Buku Pembantu Kas Tunai | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut pemeriksaan selesai | 5 tahun |
| | | - Buku Pembantu Kas Bank | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut pemeriksaan selesai | 5 tahun |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|----------|---|---------|
| | | - Rekening Koran | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut pemeriksaan selesai | 5 tahun |
| | | - Buku Pembantu Pengawasan Uang Persediaan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut pemeriksaan selesai | 5 tahun |
| | | - Buku Pembantu Pajak | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut pemeriksaan selesai | 5 tahun |
| | | - LPJ Bendahara | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut pemeriksaan selesai | 5 tahun |
| | | - Berita Acara Pemeriksaan Kas | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut pemeriksaan selesai | 5 tahun |
| | | - Register Penutupan Kas | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut pemeriksaan selesai | 5 tahun |
| | | - Buku Pembantu Pengawasan Pengembalian Belanja | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut pemeriksaan selesai | 5 tahun |

| | | | | | | | |
|----|----------|--|---|--|----------|---|---------|
| | | - Buku Pembantu Pengawasan Pemberian Uang Muka | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut pemeriksaan selesai | 5 tahun |
| 17 | KU.05 | Perbendaharaan | | | | | |
| 18 | KU.05.01 | Peraturan Terkait Perbendaharaan | | | | | |
| | | a. Ketentuan Internal Terkait Pelaksanaan Anggaran yang dikeluarkan PPATK | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | selama masih berlaku | 3 tahun |
| | | b. Keputusan Kepala PPATK tentang Penetapan : - Kuasa Pengguna Anggaran | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 3 tahun |
| | | - Kuasa Pengguna Barang | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 3 tahun |
| | | - Pejabat Pembuat Komitmen | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 3 tahun |
| | | - Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 3 tahun |
| | | - Pejabat Penanda Tangan SPM | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 3 tahun |
| | | - Bendahara Pengeluaran/Penerimaan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 3 tahun |

| | | | | | | | |
|----|----------|--|---|--|----------|---|---|
| | | - Pengelola Barang | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai | 3 tahun |
| 19 | KU.05.02 | Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) | | | | | |
| | | Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara: | | | | | |
| | | - Tuntutan Perbendaharaan (TP) | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti | 2 tahun setelah hak dan kewajiban selesai |
| | | - Tuntutan Ganti Rugi (TGR) | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti | 2 tahun setelah hak dan kewajiban selesai |
| 20 | KU.06 | Laporan Keuangan dan Kinerja | | | | | |
| 21 | KU.06.01 | Laporan Sistem Akuntansi | | | | | |
| | | a. Laporan Keuangan Bulanan | | | Terbuka | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan | 5 tahun |
| | | b. Laporan Keuangan Semesteran | | | Terbuka | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan | 5 tahun |
| | | c. Laporan Keuangan tahunan | | | | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan | 5 tahun |
| | | - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | | | Terbuka | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan | 5 tahun |
| | | - Neraca | | | Terbuka | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan | 5 tahun |
| | | - Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | | | Terbuka | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan | 5 tahun |

| | | | | | | |
|----|----------|---|---|----------|---|---------|
| | | d. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Bulanan | | Terbuka | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan | 5 tahun |
| | | e. BAR Semesteran, BAR Tiga Pihak | | Terbuka | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan | 5 tahun |
| | | f. Register Transaksi Harian | | Terbuka | 2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan | 5 tahun |
| 22 | KU.06.02 | Pemeriksaan | | | | |
| | | a. Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh Inspektorat | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun setelah tindak lanjut selesai | 5 tahun |
| | | b. Laporan Reviu atas Laporan Keuangan oleh Inspektorat | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun setelah tindak lanjut selesai | 5 tahun |
| | | c. Laporan Hasil Pemeriksaan Eksternal oleh BPK - RI | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun setelah tindak lanjut selesai | 5 tahun |
| | | d. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh BPK - RI | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun setelah tindak lanjut selesai | 5 tahun |
| | | e. Tindak Lanjut/Tanggapan atas LHP BPK - RI | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun setelah tindak lanjut selesai | 5 tahun |
| 23 | KU.06.03 | Laporan Akutabilitas Instansi | | | | |
| | | a. Rencana Kinerja tahunan (RKT) | | Terbuka | 2 tahun | 3 tahun |
| | | b. Penetapan Kinerja (PK) | | Terbuka | 3 tahun | 4 tahun |
| | | c. LAKIP PPAK | | Terbuka | 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir | 4 tahun |

| NO. | KODE KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | 0 | KONSEKUENSI PERTIMBANGAN | | JANGKA WAKTU | |
|----------|------------------|--|---|--------------------------|--|---|---|
| | | | | TERBUKA | TERTUTUP | AKTIF | INAKTIF |
| H | TI | TEKNOLOGI INFORMASI | | | | | |
| 1 | TI.01 | Layanan berbasis Teknologi Informasi - Dokumen Rancangan Layanan - Dokumen Pengembangan Layanan - Dokumen Peningkatan Kualitas dan/atau Keandalan - Dokumen Rancangan Sistem Informasi - Dokumen Rancangan Infrastruktur TI - Dokumen Rancangan Sistem Basis Data - Dokumen Rancangan Sistem Pemantauan dan Pengelolaan Operasional Sistem dan Teknologi informasi - Dokumen Rancangan Sistem Keamanan TI - Dokumen Rancangan Data Center dan Disaster Recovery - Dokumen Topologi Jaringan TI | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup | 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun | 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun |
| 2 | TI.02 | Kebijakan / Tata Kelola - Dokumen Tata Kelola Keamanan Informasi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 5 tahun |
| 3 | TI.03 | Kajian / Analisis - Dokumen Risiko TI dan Bisnis (risk profile/risk register) - Dokumen Efektifitas dan Efisiensi penerapan TI - Dokumen Analisa Kebutuhan Bisnis dan Pemangku - Dokumen Kajian dan Analisa terhadap Proses Bisnis yang - Dokumen Kajian dan Analisa terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup | 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun | 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun |
| 4 | TI.04 | Rancangan dan Analisis Sistem Aplikasi - Spesifikasi Kebutuhan Pengembangan Aplikasi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 5 tahun |
| 5 | TI.05 | Perencanaan Operasional - Spesifikasi Hardware - Spesifikasi Software | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup Tertutup | 2 tahun 2 tahun | 5 tahun 5 tahun |
| 6 | TI.06 | Pembangunan dan Pengembangan - Source code aplikasi - Rekapitulasi Aplikasi yang telah dikembangkan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup Tertutup Terbuka | 2 tahun 2 tahun 2 tahun | 5 tahun 5 tahun 5 tahun |
| 7 | TI.07 | Pengujian - Berita Acara UAT - Dokumen User Acceptance Test (UAT) - Dokumen Vulnerability and Security Test - Dokumen Stress Test - Dokumen System Integration Test (SIT) | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup Tertutup | 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun | 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun |
| 8 | TI.08 | Implementasi | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--|---|--|--|----------|-----------------------|----------------------|
| | | - Berita Acara Serah Terima Aplikasi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | Jika belum ada revisi | Jika ada revisi |
| | | - User Manual | | | | Terbuka | Jika belum ada revisi | Jika ada revisi |
| 9 | TI.09 | Laporan | | | | | | |
| | | - Laporan Visualink | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun | 5 tahun |
| | | - Laporan Back Up Data Bulanan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun | 5 tahun |
| | | - Laporan Kegiatan Proxy Squid Bulanan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun | 5 tahun |
| | | - Laporan Update Patches Bulanan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun | 5 tahun |
| | | - Laporan Restore Data | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun | 5 tahun |
| | | - Laporan Layanan Bantuan TI | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun | 5 tahun |
| | | - Laporan Pengelolaan System Email | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun | 5 tahun |
| | | - Laporan Root Cause Analysis | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun | 5 tahun |
| | | - Laporan MRTG Bulanan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun | 5 tahun |
| | | - Laporan Kegiatan Operasional Lainnya | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun | 5 tahun |
| | | - Laporan Evaluasi/Audit Sistem TI | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun | 5 tahun |
| | | - Rekapitulasi Layanan bantuan TI | | | | Terbuka | 2 tahun | 5 tahun |
| 10 | TI.10 | Lisensi | | | | | | |
| | | - Lisensi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | selama masih berlaku | Jika ada revisi baru |
| 11 | TI.11 | Non Disclosure Agreement | | | | | | |
| | | - NDA | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun | 5 tahun |
| 12 | TI.12 | Rancangan & Perencanaan Teknologi Informasi | | | | | | |
| | | - Dokumen Arsitektur TI | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun | 5 tahun |
| | | - Dokumen Kesesuaian antara Bisnis dengan TI (IT & Business Alignment) | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun | 5 tahun |
| | | - Dokumen Cetak Biru TI (IT master plan/blue print) | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun | 5 tahun |
| | | - Dokumen BCP/DRP | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun | 5 tahun |
| 13 | TI.13 | Prosedur / SPO | | | | | | |
| | | - Standard Procedure Operational | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun | 5 tahun |
| | | - Petunjuk Teknis | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun | 5 tahun |

| NO. | KODE KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | DASAR PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI PERTIMBANGAN | | JANGKA WAKTU | |
|----------|------------------|--|---|--------------------------|----------|-------------------------------------|---------|
| | | | | TERBUKA | TERTUTUP | AKTIF | INAKTIF |
| I | PW | PENGAWASAN | | | | | |
| 1 | PW.01 | Rencana Pengawasan | | | | | |
| | | - Dokumen Kebijakan Pengawasan Intern | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Program Kerja Pengawasan tahunan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| 2 | PW.02 | Pengawasan Internal | | | | | |
| 3 | PW.02.01 | Kertas Kerja Pengawasan (KKP) | | | | | |
| | | - Surat Tugas | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Surat tugas audit investigasi/tujuan tertentu | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Surat tugas audit | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Surat tugas terkait kegiatan pengawasan dalam rangka memberikan keyakinan Terbatas | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Memo/surat pemberitahuan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Memo audit investigasi/tujuan tertentu | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Memo audit | | | | 2 Tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Memo terkait kegiatan pengawasan dalam rangka memberikan keyakinan Terbatas | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Kuesioner | | | | 2 Tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Kuisisioner audit | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Kuisisioner terkait kegiatan pengawasan dalam rangka memberikan keyakinan Terbatas | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Wawancara/BAP | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Wawancara audit investigasi/tujuan tertentu | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Wawancara audit | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Wawancara terkait kegiatan pengawasan dalam rangka memberikan keyakinan Terbatas | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Program Kerja Audit/PKA | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Data/Ikhtisar Temuan Sementara | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |

| | | | | | | | |
|---|----------|--|---|--|----------|---------------------------------------|---------|
| | | - Daftar Temuan Definitive | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Surat Penolakan Pengawasan dari Auditee | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Tanggapan Auditee terhadap Data/Ikhtisar Temuan Sementara | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |
| 4 | PW.02.02 | Laporan Hasil Pengawasan (LHP) | | | | | |
| | | - LHP Audit Internal | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah tindak lanjut selesai | 5 tahun |
| | | - LHP terkait audit investigasi/tujuan tertentu | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah tindak lanjut selesai | 5 tahun |
| | | - LHP terkait audit | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah tindak lanjut selesai | 5 tahun |
| | | - LHP terkait pemberian keyakinan Terbatas | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah tindak lanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Ikhtisar Hasil Pengawasan Audit Internal semesteran dan tahunan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah tindak lanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Ikhtisar Hasil Pengawasan terkait audit investigasi/tujuan tertentu | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah tindak lanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Ikhtisar Hasil pengawasan terkait audit | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah tindak lanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Ikhtisar Hasil terkait pemberian keyakinan Terbatas | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah tindak lanjut selesai | 5 tahun |
| 5 | PW.02.03 | Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan | | | | | |
| | | - Laporan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil Pemeriksaan audit internal | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah tidaklanjuti selesai | 5 tahun |
| 6 | PW.03 | Pengawasan Eksternal | | | | | |
| 7 | PW.03.01 | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | | | | | |
| | | - LHP hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal semesteran dan tahunan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Rencana aksi (<i>action plan</i>) terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan Auditor Eksternal | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Jawaban atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Auditor Eksternal | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |
| | | - Tanggapan PPAK terhadap Data/Ikhtisar Temuan Sementara | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah tidaklanjut selesai | 5 tahun |
| 8 | PW.03.02 | Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------|---|---|---------|----------|--------------------------------------|---------|
| | | - Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah tindaklanjut selesai | 5 tahun |
| 9 | PW.04 | Pengaduan Masyarakat | | | | | |
| | | - Rekapitulasi tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pegawai (<i>Whistleblowing System</i>) | | Terbuka | | 3 tahun | 5 tahun |
| 10 | PW.04.01 | Penyalahgunaan Wewenang | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun | 5 tahun |
| 11 | PW.04.02 | Korupsi/Pungutan Liar | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun | 5 tahun |
| 12 | PW.04.03 | Kepegawaian | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun | 5 tahun |
| 13 | PW.04.04 | Hukum dan HAM | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun | 5 tahun |
| 14 | PW.04.05 | Kewaspadaan Nasional | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun | 5 tahun |
| 15 | PW.04.06 | Tata Laksana dan Regulasi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun | 5 tahun |

| NO. | KODE KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | DASAR PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI PERTIMBANGAN | | JANGKA WAKTU | |
|-----|------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|----------|------------------------------|---------|
| | | | | TERBUKA | TERTUTUP | AKTIF | INAKTIF |
| 0 | PR | PEMERIKSAAN DAN RISET | | | | | |
| 1 | PR.01 | Kasus Pemeriksaan | | | | | |
| | | a. Dokumen Pendukung Pemeriksaan | | | | | |
| | | - Dokumen Penelaahan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Memo | | | | | |
| | | -Memo terkait substansi pemeriksaan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Memo terkait administratif | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Surat-surat | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Dokumen Pendukung Internal | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Dokumen Pendukung Eksternal, dan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Dokumen Terkait lainnya | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | b. Kertas Kerja Pemeriksaan | | | | | |
| | | - Mutasi Rekening | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Informasi Profil | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | c. Hasil Pemeriksaan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan | | | | |
| | | - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Informasi Hasil Pemeriksaan (IHP) | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| 2 | PR.02 | Riset Analisis Strategis | | | | | |
| 3 | PR.02.01 | Riset Analisis Strategis Rutin | | | | | |
| | | a. Dokumen Pendukung Riset | | | | | |
| | | - Proposal Riset | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Memo | | | | | |
| | | -Memo terkait substansi Riset | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Memo terkait administratif | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Surat-surat | | | | | |
| | | - Surat terkait substansi Riset | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Surat terkait administratif | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Dokumen Pendukung Internal | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Dokumen Pendukung Eksternal, dan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Dokumen Terkait lainnya | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | b. Kertas Kerja Riset | | | | | |
| | | - Data Quesioner dll. | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| | | c. Hasil Riset | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan | | | | |
| | | - Hasil Riset Final Internal | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| | | - Hasil Riset Final Stakeholder | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| | | - Hasil Riset Final Publik | | Terbuka | | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| 4 | PR.02.02 | Riset Analisis Strategis Non Rutin | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------|------------------------------------|---|----------|------------------------------|---------|
| | | a. Dokumen Pendukung Riset | | | | |
| | | - Proposal Riset | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Memo | | | | |
| | | -Memo terkait substansi Riset | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Memo terkait administratif | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Surat-surat | | | | |
| | | - Surat terkait substansi Riset | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Surat terkait administratif | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Dokumen Pendukung Internal | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Dokumen Pendukung Eksternal, dan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Dokumen Terkait lainnya | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | b. Kertas Kerja Riset | | | | |
| | | - Data Quesioner dll. | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| | | c. Hasil Riset | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan | | | |
| | | - Hasil Riset Final Internal | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| | | - Hasil Riset Final Stakeholder | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| | | - Hasil Riset Final Publik | | Terbuka | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| 5 | PR.03 | Riset Tipologi | | | | |
| 6 | PR.03.01 | Riset Tipologi Rutin | | | | |
| | | a. Dokumen Pendukung Riset | | | | |
| | | - Proposal Riset | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Memo | | | | |
| | | -Memo terkait substansi Riset | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Memo terkait administratif | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Surat-surat | | | | |
| | | - Surat terkait substansi Riset | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Surat terkait administratif | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Dokumen Pendukung Internal | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Dokumen Pendukung Eksternal, dan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Dokumen Terkait lainnya | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | b. Kertas Kerja Riset | | | | |
| | | - Data Quesioner dll. | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| | | c. Hasil Riset | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan | | | |
| | | - Hasil Riset Final Internal | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| | | - Hasil Riset Final Stakeholder | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | Tertutup | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| | | - Hasil Riset Final Publik | | Terbuka | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| 7 | PR.03.02 | Riset Tipologi Non Rutin | | | | |
| | | a. Dokumen Pendukung Riset | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|--|---|---------|----------|------------------------------|---------|
| | | - Proposal Riset | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Memo | | | | | |
| | | -Memo terkait substansi Riset | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Memo terkait administratif | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Surat-surat | | | | | |
| | | - Surat terkait substansi Riset | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Surat terkait administratif | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Dokumen Pendukung Internal | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Dokumen Pendukung Eksternal, dan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Dokumen Terkait lainnya | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | b. Kertas Kerja Riset | | | | | |
| | | - Data Quesioner dll. | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| | | c. Hasil Riset | | | | | |
| | | - Hasil Riset Final Internal | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| | | - Hasil Riset Final Stakeholder | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| | | - Hasil Riset Final Publik | | Terbuka | | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| 8 | PR.04 | Statistik | | | | | |
| | | a. Kertas Kerja Statistik | | | | | |
| | | - Data Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 1 tahun |
| | | - Laporan Transaksi Keuangan Tunai | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 1 tahun |
| | | - CBCC (Cross Border Cash Carrier) | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 1 tahun |
| | | - Laporan PBJ (Penyediaan Barang Jasa) | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 1 tahun |
| | | b. Hasil Statistik | | | | | |
| | | - Buletin Statistik Mingguan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Buletin Statistik Bulanan | | Terbuka | | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Buletin Statistik Semesteran | | Terbuka | | 2 tahun | 3 tahun |

| NO. | KODE KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | DASAR PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI PERTIMBANGAN | | JANGKA WAKTU | |
|-----|---------------------|---|--|--------------------------|----------|--------------|---------|
| | | | | TERBUKA | TERTUTUP | AKTIF | INAKTIF |
| L | PK | PENGAWASAN KEPATUHAN | | | | | |
| 1 | PK.01 | Rencana Audit | | | | | |
| 2 | PK.01.01 | Rencana Kegiatan Audit Tahunan dan Triwulanan | | | | | |
| | | - SK Pelaksanaan Audit tahunan | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun | 3 tahun |
| | | - Perubahan SK Pelaksanaan Audit tahunan | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun | 3 tahun |
| | | - Rencana Audit tahunan | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun | 3 tahun |
| | | - Rencana Pemantauan tahunan | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun | 3 tahun |
| | | - Memo Penyampaian Rencana Audit tahunan | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun | 3 tahun |
| | | - Rencana Audit Triwulanan | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun | 3 tahun |
| | | - Rencana Pemantauan Triwulanan | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun | 3 tahun |
| | | - Memo Penyampaian Rencana Audit Triwulanan | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun | 3 tahun |

| | | | | | | | |
|---|----------|---|--|--|--|----------|---|
| | | - Matriks Pelaksanaan Audit Triwulanan | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | 1 tahun | 3 tahun |
| 3 | PK.01.02 | Rencana Kegiatan Audit Insidentil | | | | Tertutup | |
| | | - Rencana Audit Insidentil | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 1 tahun 3 tahun |
| | | - Memo Penyampaian Rencana Audit Insidentil | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 | | | Tertutup | 1 tahun 3 tahun |
| 4 | PK.02 | Hasil Audit | | | | | |
| 5 | PK.02.01 | Hasil Audit Yang Dilakukan Oleh PPAK | | | | | |
| | | - Surat Pemberitahuan Audit | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun setelah ditindak lanjuti 3 tahun |
| | | - Surat Koordinasi Kepada LPP | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun setelah ditindak lanjuti 3 tahun |
| | | - Permintaan Data Audit | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun setelah ditindak lanjuti 3 tahun |
| | | - Surat Pengantar Audit (Introduksi) | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun setelah ditindak lanjuti 3 tahun |
| | | - Kertas Kerja Audit | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | Tertutup | 2 tahun setelah ditindak lanjuti 3 tahun |

| | | | | | |
|--|--|--|----------|----------------------------------|---------|
| - Berita Acara Exit Meeting | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah ditindak lanjuti | 3 tahun |
| - Laporan Hasil Audit | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah ditindak lanjuti | 3 tahun |
| - Surat Pembinaan | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah ditindak lanjuti | 3 tahun |
| - Surat Penyampaian Hasil Audit Kepada LPP | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah ditindak lanjuti | 3 tahun |
| - Tanggapan Pihak Pelapor atas Hasil Audit | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah ditindak lanjuti | 3 tahun |
| - Tanggapan LPP atas Hasil Audit | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah ditindak lanjuti | 3 tahun |
| - Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah ditindak lanjuti | 3 tahun |
| - Rekomendasi Pengenaan Sanksi | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah ditindak lanjuti | 3 tahun |

| | | | | | | |
|---|---|--|---------|--|----------------------------------|---------|
| | - Memo Penyampaian Dokumen Hasil Audit | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | 2 tahun setelah ditindak lanjuti | 3 tahun |
| | Statistik Rekapitulasi Penilaian Indeks Tingkat Kepatuhan | | Terbuka | | 2 tahun setelah ditindak lanjuti | 3 tahun |
| | Statistik Jumlah Pelaksanaan Audit | | Terbuka | | 2 tahun setelah ditindak lanjuti | 3 tahun |
| | Statistik Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan Asosiasi Pihak Pelapor | | Terbuka | | 2 tahun setelah ditindak lanjuti | 3 tahun |
| | - Hasil Pengawasan Kepatuhan yang Dilakukan oleh LPP | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | 2 tahun setelah ditindak lanjuti | 3 tahun |
| | - Memo Penyampaian Hasil Pengawasan Kepatuhan yang dilakukan oleh LPP | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | 2 tahun setelah ditindak lanjuti | 3 tahun |
| | Statistik Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dengan LPP | | | | | |
| 7 | PK.03 | Pendukung Audit | | | | |
| | - Profil Pihak Pelapor | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | 1 tahun setelah masuk database | - |
| | - Profil Pengguna Jasa | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | | 1 tahun setelah masuk database | - |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|----------|--------------------------------|---|
| | - Transaksi Pengguna Jasa | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah masuk database | - |
|--|---------------------------|--|--|----------|--------------------------------|---|

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PUSAT PELAPORAN ANALISIS DAN TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)**

| NO. | KODE | JENIS ARSIP | DASAR HUKUM PERTIMBANGAN | KONSEKUENSI PERTIMBANGAN | | Jangka Waktu | |
|-----|-----------|--|--|--------------------------|----------|-----------------------------------|---------|
| | | | | TERBUKA | TERTUTUP | AKTIF | INAKTIF |
| | PN | PELAPORAN | | | | | |
| 1 | PN.01 | Kebijakan Pelaporan | | | | | |
| 2 | PN.01.01 | Nota Dinas dan Surat terkait rumusan kebijakan di bidang pelaporan atau usulan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 4 tahun setelah selesai reviu | 5 tahun |
| 3 | PN.01.02 | Nota Dinas dan Surat terkait penyusunan ketentuan pedoman bagi Pihak pelapor | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 4 tahun setelah selesai reviu | 5 tahun |
| 4 | PN.01.03 | Nota Dinas dan Surat terkait koordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur serta pihak terkait lainnya mengenai penyusunan ketentuan pedoman bagi Pihak Pelapor | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun | 5 tahun |
| 5 | PN.01.04 | Nota Dinas dan Surat terkait tindak lanjut atas permohonan pengecualian laporan transaksi keuangan tunai oleh penyedia jasa keuangan | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 4 tahun | 5 tahun |
| 6 | PN.01.05 | Pelaksanaan pengolahan dan penyediaan data dan informasi pengguna jasa terpadu yang diterima dari Penyedia Jasa Keuangan | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah data masuk sistem | 2 tahun |
| 7 | PN.01.06 | Penyusunan perencanaan dan pengembangan data dan informasi yang diterima oleh PPATK | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun | 5 tahun |
| 8 | PN.02 | Bimbingan Pihak Pelapor | | | | | |
| 9 | PN.02.01 | Bimbingan Teknis dan Asistensi Pihak Pelapor | | | | | |
| | | - Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknik dan Asistensi bagi Pihak Pelapor | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| 10 | PN.02.02 | Reviu Pedoman Anti Pencucian Uang | | | | | |
| | | - Nota Dinas dan surat terkait reviu pedoman | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah selesai direviu | 2 tahun |
| 11 | PN.02.03 | Penanganan Penundaan Transaksi | | | | | |
| | | - Nota Dinas dan surat tanggapan terkait penundaan transaksi ke Pihak Pelapor | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | - Nota Dinas Rekapitulasi dua mingguan penundaan transaksi | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah ditindaklanjuti | 2 tahun |

| | | | | | | | |
|----|----------|--|--|--|----------|---------------------------------|---------|
| | | - Berita acara penundaan transaksi dari Pihak Pelapor | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| 12 | PN.02.04 | Administrasi Pelaporan | | | | | |
| | | - Dokumen Registrasi Pihak Pelapor | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| | | - Pengkinian Petugas Pelapor, Penghubung, Administrator | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah diteruskan | 3 tahun |
| | | - Nota Dinas, surat dan <i>e-mail</i> | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| 13 | PN.02.05 | Pengelolaan Direktori Pihak Pelapor | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah diteruskan | 3 tahun |
| 14 | PN.02.06 | Pengelolaan layanan bantuan dan tindak lanjut dan pemberian tanggapan atas pertanyaan dan pengaduan dari Pihak Pelapor | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah ditindaklanjuti | 2 tahun |
| 16 | PN.03 | Pengelolaan Pelaporan | | | | | |
| 17 | PN.03.01 | Nota Dinas dan Surat terkait Pengelolaan permintaan dan penerimaan laporan dan informasi dari Pihak Pelapor dan pihak terkait lainnya | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah diteruskan | 3 tahun |
| 18 | PN.03.02 | Nota Dinas dan Surat terkait Pengelolaan data yang diperoleh untuk menunjang kepentingan analisis, pemeriksaan, riset dan pengembangan serta audit | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah diteruskan | 3 tahun |
| 19 | PN.03.03 | Evaluasi Kualitas Laporan | | | | | |
| | | Evaluasi atas kualitas laporan dan pemberian umpan balik kepada Pihak Pelapor | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah diteruskan | 3 tahun |
| | | Rekapitulasi hasil evaluasi kualitas laporan | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |
| 20 | PN.03.04 | Pengenaan Sanksi bagi Pihak Pelapor | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|----------|----------------------------|---------|
| | | Pengenaan sanksi administratif kepada Pihak Pelapor terkait pelanggaran dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah diteruskan | 3 tahun |
| | | Pengenaan sanksi administratif dan rekomendasi pencabutan izin usaha terhadap Pihak Pelapor kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur. | 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | |

| NO. | KODE KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | DASAR PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI PERTIMBANGAN | | JANGKA WAKTU | |
|----------|------------------|---|---|--------------------------|----------|--------------|---------|
| | | | | TERBUKA | TERTUTUP | AKTIF | INAKTIF |
| J | HM | HUBUNGAN MASYARAKAT | | | | | |
| 1 | HM.01 | Data Kehumasan | | | | | |
| 2 | HM.01.01 | Analisis Berita | | Tertutup | 5 tahun | 5 tahun | |
| 3 | HM.01.02 | Data Kualitatif | | | | | |
| | | - Karya Tulis Kehumasan | | Terbuka | 5 tahun | 5 tahun | |
| 4 | HM.01.03 | Data Kuantitatif | | | | | |
| | | - Data statistik kehumasan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 4 tahun |
| | | - Hasil survei kehumasan dan lain-lain | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 4 tahun |
| 5 | HM.02 | Penerangan Internal/ Eksternal | | | | | |
| | | - Kliping | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun | 3 tahun |
| | | - newsletter | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun | 3 tahun |
| 6 | HM.02.01 | Pengumpulan, pengolahan dan penyajian | | | | | |
| | | - Kliping koran | | Terbuka | 1 tahun | 2 tahun | |
| | | - Brosur/leaflet/poster/plakat | | Terbuka | 1 tahun | 2 tahun | |
| | | - Pengumuman/pemberitaan | | Terbuka | 1 tahun | 2 tahun | |
| 7 | HM.02.02 | Sosialisasi | | | | | |
| | | - Rencana sosialisasi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | TERTUTUP | 1 tahun | 3 tahun |
| | | - Dokumentasi Laporan Sosialisasi | | Terbuka | 1 tahun | 3 tahun | |
| 8 | HM.02.03 | Pers/Media Massa | | | | | |
| | | - Jumpa press | | Terbuka | 1 tahun | 4 tahun | |
| | | - Media visit | | Terbuka | 1 tahun | 4 tahun | |
| 9 | HM.02.04 | Pameran | | | | | |
| | | - Rencana Pameran | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun | 4 tahun |
| | | - Laporan Pelaksanaan Pameran | | Terbuka | 1 tahun | 4 tahun | |
| 10 | HM.02.05 | Website | | | | | |
| | | - Memo koordinasi time website | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun | 3 tahun |
| 11 | HM.02.06 | Intranet | | | | | |
| | | - Informasi internal PPATK | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun | 3 tahun |
| 12 | HM.03 | Hubungan Kelembagaan | | | | | |
| 13 | HM.03.01 | DPR/BPK/KPK/Kejaksaan/Kepolisian | | | | | |
| | | - Rapat Kerja | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 5 tahun | 5 tahun |
| | | - Dengar pendapat/Hearing DPR | | Terbuka | 5 tahun | 5 tahun | |
| 14 | HM.03.02 | Antar Lembaga/Non Lembaga | | | | | |
| | | - Korespondensi antar lembaga/non lembaga | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun | 4 tahun |
| 15 | HM.03.03 | Organisasi dan Profesi | | | | | |
| | | - Korespondensi antar organisasi dan profesi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun | 4 tahun |
| 16 | HM.03.04 | Organisasi Kehumasan Lainnya | | | | | |
| | | - Undangan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun | 4 tahun |
| 17 | HM.04 | Penerbitan | | | | | |
| | | - Majalah | | Terbuka | 1 tahun | 3 tahun | |
| | | - Buletin | | Terbuka | 1 tahun | 3 tahun | |
| 18 | HM.05 | Publikasi melalui media cetak maupun elektronik | | Terbuka | 1 tahun | 3 tahun | |
| 19 | HM.06 | Dokumentasi | | | | | |
| | | - Foto | | Terbuka | 5 tahun | 5 tahun | |
| | | - Rekaman suara | | Terbuka | 5 tahun | 5 tahun | |
| | | - Video | | Terbuka | 5 tahun | 5 tahun | |
| 20 | HM.07 | Laporan | | | | | |
| 21 | HM.07.01 | Laporan Berkala | | | | | |
| | | a. Laporan Triwulan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun | 1 tahun |
| | | b. Laporan Semester PPATK | | terbuka | 1 tahun | 1 tahun | |
| | | c. Laporan Tahunan Unit Kerja/ Direktorat | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | d. Laporan Tahunan PPATK | | Terbuka | 2 tahun | 3 tahun | |
| 22 | HM.07.02 | Laporan Insidental | | Terbuka | 2 tahun | 4 tahun | |

| P | KS | KERJA SAMA | | | | | |
|---|-------|--|---|---------|----------|----------------------|---------|
| 1 | KS.01 | Dalam Negeri | | | | | |
| | | - Hasil evaluasi nota kesepahaman antara PPATK dengan instansi terkait dalam negeri | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | selama masih berlaku | 3 tahun |
| | | - Surat permintaan informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan hasil analisis dan/atau hasil pemeriksaan PPATK | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | selama masih berlaku | 3 tahun |
| | | - Bahan penyelenggaraan pertemuan Komite TPPU dan organ Komite TPPU | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | selama masih berlaku | 3 tahun |
| | | - Bahan rumusan rancangan kebijakan di bidang KSDN | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | selama masih berlaku | 3 tahun |
| | | - Undangan rapat koordinasi dengan instansi terkait | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | selama masih berlaku | 3 tahun |
| 2 | KS.02 | Luar Negeri | | | | | |
| | | - Hasil evaluasi nota kesepahaman antara PPATK dengan instansi terkait luar negeri | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | selama masih berlaku | 3 tahun |
| | | - Korespondensi dengan instansi dalam negeri terkait dengan kerjasama luar negeri | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | selama masih berlaku | 3 tahun |
| | | - APG on ML dan Egmont Group | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | selama masih berlaku | 3 tahun |
| | | a. Terkait penanganan kasus | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | selama masih berlaku | 3 tahun |
| | | b. Tidak terkait penanganan kasus | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | selama masih berlaku | 3 tahun |
| | | - Rumusan rancangan kebijakan di bidang KSLN | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | selama masih berlaku | 3 tahun |
| | | - Undangan rapat koordinasi dengan instansi terkait | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | selama masih berlaku | 3 tahun |
| | | - Rekapitulasi Jumlah MoU PPATK dengan FIU negara lain | | Terbuka | | selama masih berlaku | 3 tahun |
| | | - Matriks pemenuhan rekomendasi FATF | | Terbuka | | selama masih berlaku | 3 tahun |

| NO. | KODE KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | DASAR PENGUCUALIAN INFORMASI | | KONSEKUENSI PERTIMBANGAN | | JANGKA WAKTU | |
|----------|---------------------|--|---|--|--------------------------|----------|---------------------------------------|---------|
| | | | | | TERBUKA | TERTUTUP | AKTIF | INAKTIF |
| M | HK | HUKUM | | | | | | |
| 1 | HK.01 | Analisis Hukum | | | | | | |
| 2 | HK.01.01 | Pertimbangan dan Pendapat Hukum | | | | | | |
| | | - Bahan penyusunan pertimbangan dan pendapat hukum | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | 1 tahun setelah tindak lanjut selesai | 2 tahun |
| | | - Surat permintaan pertimbangan dan pendapat hukum | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | 1 tahun setelah tindak lanjut selesai | 2 tahun |
| | | - Nota Dinas permintaan dan pertimbangan pendapat hukum | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | 1 tahun setelah tindak lanjut selesai | 2 tahun |
| | | - Nota Dinas pertimbangan dan pendapat hukum | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | 1 tahun setelah tindak lanjut selesai | 2 tahun |
| | | - Surat tanggapan hukum | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | 1 tahun setelah tindak lanjut selesai | 2 tahun |
| 3 | HK.01.02 | Rekomendasi Pemberian Sanksi Bagi Pihak Pelapor | | | | | | |
| | | - Bahan penyusunan pendapat hukum mengenai usulan pemberian peringatan atau pengenaan sanksi dan rekomendasi pemberian peringatan, pengenaan sanksi, atau rekomendasi pencabutan izin usaha Pihak Pelapor | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | 1 tahun setelah tindak lanjut selesai | 2 tahun |
| | | - Nota Dinas penyampaian usulan pemberian peringatan atau pengenaan sanksi dan rekomendasi pemberian peringatan, pengenaan sanksi, atau rekomendasi pencabutan izin usaha Pihak Pelapor | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | 1 tahun setelah tindak lanjut selesai | 2 tahun |
| | | - Nota Dinas pertimbangan dan pendapat hukum mengenai usulan pemberian peringatan atau pengenaan sanksi dan rekomendasi pemberian peringatan, pengenaan sanksi, atau rekomendasi pencabutan izin usaha Pihak Pelapor | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | 1 tahun setelah tindak lanjut selesai | 2 tahun |
| | | - Surat Peringatan kepada Pihak Pelapor | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | 1 tahun setelah tindak lanjut selesai | 2 tahun |
| | | - Surat rekomendasi pencabutan izin usaha kepada otoritas yang berwenang | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | 1 tahun setelah tindak lanjut selesai | 2 tahun |
| | | - SK Kepala PPAK mengenai pengenaan sanksi administratif kepada pihak pelapor | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | 1 tahun setelah tindak lanjut selesai | 2 tahun |
| 4 | HK.01.03 | Pendapat Hukum Mengenai Penanganan Keberatan Atas | | | | | | |
| | | - Bahan penyusunan pendapat hukum mengenai penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | 2 tahun | 2 tahun |
| | | - Surat keberatan atas penghentian sementara transaksi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | 2 tahun | 2 tahun |
| | | - Nota Dinas pendapat hukum mengenai penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | 2 tahun | 2 tahun |
| | | - Surat tanggapan mengenai keberatan atas penghentian sementara transaksi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | 2 tahun | 2 tahun |
| 5 | HK.01.04 | Tafsir atau Fatwa dari Otoritas yang Berwenang | | | | | | |
| | | - Bahan penyusunan tafsir atau fatwa kepada otoritas yang berwenang | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | tertutup | | 2 tahun | 2 tahun |
| | | - Nota Dinas pertimbangan dan pendapat hukum mengenai penyusunan tafsir atau fatwa kepada otoritas yang berwenang | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | tertutup | | 2 tahun | 2 tahun |
| | | - Surat permohonan tafsir atau fatwa kepada otoritas yang berwenang | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | tertutup | | 1 tahun | 2 tahun |
| 6 | HK.01.05 | Penyusunan Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian | | | | | | |
| | | - Bahan penyusunan anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | 2 tahun | 2 tahun |
| | | - Nota Dinas penyampaian konsep anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | 2 tahun | 2 tahun |
| | | - Anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | 2 tahun | 2 tahun |
| | | - Surat penyampaian atau pendistribusian anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | 2 tahun | 2 tahun |
| | | - Dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan penyusunan, pencetakan, dan pendistribusian anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | 2 tahun | 2 tahun |
| 7 | HK.01.06 | Kajian Hukum | | | | | | |
| | | - Bahan penyusunan kajian hukum | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Nota Dinas penyampaian hasil kajian hukum | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | | 2 tahun | 3 tahun |

| | | | | | | | |
|----|----------|---|---|---------|----------|-------------------------------|---------|
| | | - Surat rekomendasi kepada instansi terkait | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Dokumen administrasi penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan kajian hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk penyiapan dan pelaksanaan seminar/workshop/diskusi/sarasehan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| 8 | HK.02 | Legislasi | | | | | |
| 10 | HK.02.01 | Peraturan Perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian | | | | | |
| | | a. Rancangan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan | | Terbuka | | sampai dengan diundangkan | 3 tahun |
| | | b. Rancangan Peraturan Pemerintah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan | | Terbuka | | sampai dengan diundangkan | 3 tahun |
| | | c. Rancangan Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan | | Terbuka | | sampai dengan diundangkan | 3 tahun |
| 11 | HK.02.02 | Peraturan Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang | | | | | |
| | | - Bahan penelaahan, penyusunan, harmonisasi, sinkronisasi dan diseminasi Peraturan Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah tidak berlaku | 2 tahun |
| | | - Nota Dinas penyampaian rancangan Peraturan Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah tidak berlaku | 2 tahun |
| | | - Surat penyampaian Peraturan Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme kepada instansi terkait | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah tidak berlaku | 2 tahun |
| | | - Peraturan Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | | Terbuka | | 1 tahun setelah tidak berlaku | 2 tahun |
| | | - Dokumen administrasi pelaksanaan penyusunan, harmonisasi, sinkronisasi dan diseminasi Peraturan Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah tidak berlaku | 2 tahun |
| 12 | HK.02.03 | Keputusan Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang | | | | | |
| | | - Bahan penelaahan, penyusunan, harmonisasi, sinkronisasi dan diseminasi Keputusan Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah tidak berlaku | 2 tahun |
| | | - Nota Dinas penyampaian rancangan Keputusan Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah tidak berlaku | 2 tahun |
| | | - Surat penyampaian Keputusan Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah tidak berlaku | 2 tahun |
| | | - Keputusan Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah tidak berlaku | 2 tahun |
| 13 | HK.02.04 | Surat Edaran Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian | | | | | |
| | | - Bahan penelaahan, penyusunan, harmonisasi, sinkronisasi dan diseminasi Surat Edaran Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah tidak berlaku | 2 tahun |
| | | - Nota Dinas penyampaian rancangan Surat Edaran Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah tidak berlaku | 2 tahun |
| | | - Surat penyampaian Surat Edaran Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah tidak berlaku | 2 tahun |
| | | - Surat Edaran Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | | Terbuka | | 1 tahun setelah tidak berlaku | 2 tahun |
| 14 | HK.02.05 | Hasil Telaahan atas Peraturan Perundang-undangan Terkait | | | | | |
| | | - Bahan penyusunan telaahan atas peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta nota kesepahaman / kesepakatan bersama / kesepahaman bersama / perjanjian bersama | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |

| | | | | | | | |
|----|----------|--|---|--|----------|-------------------------------|---------|
| | | - Nota Dinas dan/atau Memorandum penyampaian hasil telaahan atas peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta nota kesepahaman / kesepakatan bersama / kesepahaman bersama / perjanjian bersama | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Surat penyampaian hasil telaahan atas peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta nota kesepahaman / kesepakatan bersama / kesepahaman bersama / perjanjian bersama | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| 15 | HK.02.06 | Produk Hukum atas Ketentuan Internal PPAK | | | | | |
| | | - Bahan penelaahan dan/atau penyusunan produk hukum atas ketentuan internal PPAK | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah tidak berlaku | 2 tahun |
| | | - Nota Dinas penyampaian rancangan produk hukum atas ketentuan internal PPAK | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah tidak berlaku | 2 tahun |
| | | - Rancangan produk hukum atas ketentuan internal PPAK | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah tidak berlaku | 2 tahun |
| | | - Dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan penyusunan produk hukum atas ketentuan internal PPAK | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah tidak berlaku | 2 tahun |
| 16 | HK.02.07 | Produk Hukum Lainnya | | | | | |
| | | - Bahan penelaahan, penyusunan, harmonisasi, sinkronisasi dan diseminasi produk hukum lainnya terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta ketentuan internal PPAK | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah tidak berlaku | 2 tahun |
| | | - Nota Dinas penyampaian rancangan produk hukum lainnya terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta ketentuan internal PPAK | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah tidak berlaku | 2 tahun |
| | | - Surat penyampaian rancangan atau produk hukum lainnya terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta ketentuan internal PPAK | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah tidak berlaku | 2 tahun |
| | | - Dokumen administrasi kegiatan penyusunan, harmonisasi, sinkronisasi dan diseminasi produk hukum lainnya terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta ketentuan internal PPAK | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah tidak berlaku | 2 tahun |
| 17 | HK.02.08 | Perjanjian atau Kontrak yang Mengikat PPAK Secara Hukum | | | | | |
| | | - Bahan penyusunan telaahan atas naskah yang berkaitan dengan penelaahan dan/atau penyusunan perjanjian atau kontrak yang mengikat PPAK secara hukum | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah tidak berlaku | 2 tahun |
| | | - Nota Dinas dan/atau Memorandum penyampaian hasil telaahan atas naskah yang berkaitan dengan penelaahan dan/atau penyusunan perjanjian atau kontrak yang mengikat PPAK secara hukum | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah tidak berlaku | 2 tahun |
| | | - Surat penyampaian hasil telaahan atas naskah yang berkaitan dengan penelaahan dan/atau penyusunan perjanjian atau kontrak yang mengikat PPAK secara hukum | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah tidak berlaku | 2 tahun |
| 18 | HK.02.09 | Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan, Produk Hukum | | | | | |
| | | - Bahan penyusunan dokumentasi peraturan perundang-undangan, produk hukum lain, ketentuan internal, rekomendasi, konvensi, dan standar internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama berlaku | - |
| | | - Nota Dinas penyampaian konsep dokumentasi peraturan perundang-undangan, produk hukum lain, ketentuan internal, rekomendasi, konvensi, dan standar | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama berlaku | - |
| | | - Dokumentasi peraturan perundang-undangan, produk hukum lain, ketentuan internal, rekomendasi, konvensi, dan standar | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama berlaku | - |
| | | - Dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan dokumentasi peraturan perundang-undangan, produk hukum lain, ketentuan internal, rekomendasi, konvensi, dan standar internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama berlaku | - |
| 19 | HK.02.10 | Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum | | | | | |
| | | - Bahan penyusunan sistem jaringan dokumentasi hukum | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama berlaku | - |
| | | - Nota Dinas penyampaian konsep sistem jaringan dokumentasi hukum | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama berlaku | - |

| | | | | | | | |
|----|----------|---|---|---------|----------|-------------------------|---------|
| | | - Laporan pelaksanaan sistem jaringan dokumentasi hukum | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama berlaku | - |
| 20 | HK.03 | Advokasi | | | | | |
| 21 | HK.03.01 | Bantuan Hukum Litigasi di Peradilan Umum | | | | | |
| | | - Surat Kuasa Khusus | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Nota Dinas penyampaian tanggapan atas bantuan hukum litigasi di peradilan umum | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Dokumen litigasi di peradilan umum | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Nota Dinas penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| | | - Bahan penyusunan dokumen litigasi di peradilan umum | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun | 3 tahun |
| 22 | HK.03.02 | Bantuan Hukum Litigasi di Mahkamah Konstitusi | | | | | |
| | | - Surat Kuasa Khusus | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah putusan | 2 tahun |
| | | - Nota Dinas penyampaian tanggapan atas bantuan hukum litigasi di Mahkamah Konstitusi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah putusan | 2 tahun |
| | | - Dokumen litigasi di Mahkamah Konstitusi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah putusan | 2 tahun |
| | | - Nota Dinas penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah putusan | 2 tahun |
| | | - Bahan penyusunan dokumen litigasi di Mahkamah Konstitusi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah putusan | 2 tahun |
| 23 | HK.03.03 | Bantuan Hukum Non-Litigasi | | | | | |
| | | - Surat Kuasa Khusus | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah putusan | 2 tahun |
| | | - Nota Dinas penyampaian tanggapan atas bantuan hukum non litigasi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah putusan | 2 tahun |
| | | - Dokumen bantuan hukum non litigasi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah putusan | 2 tahun |
| | | - Nota Dinas penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah putusan | 2 tahun |
| | | - Bahan penyusunan dokumen bantuan hukum non litigasi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah putusan | 2 tahun |
| 24 | HK.03.04 | Penanganan Keberatan atas Penghentian Sementara Transaksi | | | | | |
| | | - Surat Kuasa Khusus | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah putusan | 2 tahun |
| | | - Nota Dinas penyampaian tanggapan mengenai penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah putusan | 2 tahun |
| | | - Dokumen litigasi mengenai penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah putusan | 2 tahun |
| | | - Nota Dinas penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah putusan | 2 tahun |
| | | - Bahan penyusunan dokumen litigasi mengenai penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah putusan | 2 tahun |
| 25 | HK.03.05 | Keterangan Ahli | | | | | |
| | | - Surat permintaan keterangan ahli | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah putusan | 2 tahun |
| | | - Surat Penunjukan Ahli | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah putusan | 2 tahun |
| | | - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah putusan | 2 tahun |
| | | - Nota Dinas penyampaian laporan pelaksanaan pemberian keterangan ahli | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah putusan | 2 tahun |
| 26 | HK.03.06 | Putusan Pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang dan | | | | | |
| | | - Surat permohonan putusan pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | tertutup | | |
| | | - Putusan pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | | Terbuka | | 1 tahun setelah putusan | 2 tahun |
| 27 | HK.03.07 | Monitoring Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan | | | | | |
| | | - Bahan usulan pelaksanaan kegiatan monitoring perkara tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah putusan | 2 tahun |
| | | - Laporan pelaksanaan kegiatan monitoring perkara tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah putusan | 2 tahun |

| NO. | KODE KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | DASAR PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI PERTIMBANGAN | | JANGKA WAKTU | |
|-----|------------------|---|---|--------------------------|----------|------------------------------|---------|
| | | | | TERBUKA | TERTUTUP | AKTIF | INAKTIF |
| N | AT | ANALISIS TRANSAKSI | | | | | |
| 1 | AT.01 | Hasil Analisis Proaktif | | | | | |
| 2 | AT.01.01 | Hasil Analisis yang diteruskan ke Aparat Penegak | | | | | |
| | | - Memo | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Lembar Pendapat | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Surat Pengantar Hasil Analisis (HA) | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Hasil Analisis | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Mutasi rekening yang terkait | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Rekapitulasi Jumlah Hasil Analisis yang diteruskan ke Aparat Penegak Hukum/Regulator/Instansi lainnya | | Terbuka | | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| 3 | AT.01.02 | Hasil Analisis Database | | | | | |
| | | - Memo | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Lembar Pendapat | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Surat Pengantar Hasil Analisis | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Hasil Analisis | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Mutasi rekening yang terkait | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Rekapitulasi Jumlah Hasil Analisis Database | | Terbuka | | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| 4 | AT.02 | Hasil Analisis dari Permintaan Informasi | | | | | |
| 5 | AT.02.01 | Aparat Penegak Hukum (Penyidik TPPU) | | | | | |
| | | - Memo | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Lembar Pendapat | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Surat Pengantar Hasil Analisis (HA) | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Hasil Analisis | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Mutasi rekening yang terkait | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Surat dari Instansi Peminta | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Rekapitulasi Jumlah Permintaan Informasi | | Terbuka | | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| 6 | AT.02.02 | Non Aparat Penegak Hukum (Non Penyidik TPPU) | | | | | |
| | | - Memo | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Lembar Pendapat | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |

| | | | | | | | |
|----|----------|---|---|---------|----------|------------------------------|---------|
| | | - Surat Pengantar Hasil Analisis (HA) | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Hasil Analisis | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Mutasi rekening yang terkait | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Surat dari Instansi Peminta | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Rekapitulasi Jumlah Informasi Hasil Analisis | | Terbuka | | | |
| 7 | AT.02.03 | Luar Negeri | | | | | |
| | | - Memo | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun | 9 tahun |
| | | - Lembar Pendapat | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun | 9 tahun |
| | | - Surat pengantar penyampaian informasi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun | 9 tahun |
| | | - Informasi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun | 9 tahun |
| | | - Mutasi rekening yang terkait | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun | 9 tahun |
| | | - Surat dari FIU (Financial Intellegent Unit) | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun | 9 tahun |
| | | - Rekapitulasi Jumlah Informasi | | Terbuka | | 3 tahun | 9 tahun |
| 8 | AT.03 | Pengaduan Masyarakat | | | | | |
| | | - Memo | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Lembar Pendapat | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Lembar Filter | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Surat pengantar penyampaian informasi/ Hasil Analisis | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Informasi/ Hasil Analisis | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Mutasi rekening yang terkait | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Surat pengaduan masyarakat | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat | | Terbuka | | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| 9 | AT.04 | Analisis Advance | | | | | |
| | | - Memo usulan analisis advance | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Lembar pendapat | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| | | - Laporan analisis advance | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 3 tahun setelah diregistrasi | 9 tahun |
| 10 | AT.05 | Administrasi Transaksi Keuangan | | | | | |
| 11 | AT.05.01 | Permintaan Penghentian Sementara Transaksi | | | | | |
| | | - Lembar Pendapat | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| | | - Surat penghentian sementara | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| | | - Berita penghentian transaksi dari PJK | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |

| | | | | | | | |
|----|----------|---|---|--|----------|------------------------------|---------|
| | | - Surat pelimpahan ke penyidik terkait perampasan asset | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| 12 | AT.05.02 | Usulan Pengenaan Sanksi | | | | | |
| | | - Memo usulan pengenaan sanksi | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| | | - Lembar pendapat | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| | | - Memo kajian hukum ke DHK | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| 13 | AT.05.03 | Usulan Permintaan Pemblokiran Rekening | | | | | |
| | | - Memo | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| | | - Lembar pendapat | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| | | - Surat Usulan Permintaan Pemblokiran Rekening | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |
| | | - Memo Kajian Hukum | UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah diregistrasi | 3 tahun |

| NO. | KODE KLASIFIKASI | JENIS ARSIP | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | KONSEKUENSI PERTIMBANGAN | | JANGKA WAKTU |
|----------|---------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|----------|----------------------|
| | | | | DIBUKA | DITUTUP | |
| A | TU | KETATAUSAHAAN DAN KEARSIPAN | | | | |
| 1 | TU.01 | Tata Persuratan | | | | |
| | | - Buku Agenda | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 Tahun |
| | | - Lembar Pengantar/buku ekspedisi | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 Tahun |
| 2 | TU.02 | Kearsipan | | | | |
| 3 | TU.02.01 | Daftar arsip | | | | |
| | | - Daftar berkas dan Daftar isi berkas | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama dipergunakan |
| | | - Daftar arsip inaktif | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama dipergunakan |
| 4 | TU.02.02 | Pemeliharaan Arsip | | | | |
| | | - Jadwal pemeliharaan arsip | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 Tahun |
| 5 | TU.02.03 | Jadwal Retensi Arsip (JRA) | | | | |
| | | - Persetujuan JRA | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama masih berlaku |
| | | - JRA | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama masih berlaku |
| 6 | TU.02.04 | Layanan Arsip | | | | |
| | | - Form Peminjaman Arsip | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 Tahun |
| | | - Laporan Kinerja Unit Kearsipan | | Terbuka | | 1 Tahun |
| 7 | TU.02.05 | Pemindahan Arsip Inaktif | | | | |
| | | - Berita Acara Pemindahan | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama Berlaku |
| | | - Daftar Arsip yang dipindahkan | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama Berlaku |
| 8 | TU.02.06 | Pemusnahan Arsip | | | | |

| | | | | | | |
|----------|-----------|--|--|---------|----------|--|
| | | - Berita Acara Pemusnahan | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun |
| | | - Daftar Arsip yang dimusnahkan | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun |
| | | - Rekomendasi/pertimbangan/ pemusnahan arsip dari instansi terkait | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun |
| | | - Surat Keputusan pemusnahan | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun |
| 9 | TU.02.07 | Penyerahan Arsip | | | | |
| | | - Berita Acara Serah Terima Arsip | | Terbuka | | 2 Tahun |
| | | - Daftar Arsip yang diserahkan | | Terbuka | | 2 Tahun |
| 10 | TU.03 | Perpustakaan | | | | |
| 11 | TU.03.01 | Penyimpanan Bahan Pustaka | | | | |
| | | - Daftar buku terseleksi | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun untuk sheld list/ jajaran kendali selama masih berlaku |
| | | - Daftar buku dalam permintaan | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun untuk sheld list/ jajaran kendali selama masih berlaku |
| | | - Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, hibah | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun untuk sheld list/ jajaran kendali selama masih berlaku |
| | | - Shelt List / Jajaran Kartu utama (master list) | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun untuk sheld list/ jajaran kendali selama masih berlaku |
| | | - Daftar/ jajaran kendali (Subyek dan Pengarang) | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun untuk sheld list/ jajaran kendali selama masih berlaku |
| | | - Bukti Penerimaan Koleksi Bahan Pustaka | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun untuk sheld list/ jajaran kendali selama masih berlaku |
| | | - Administrasi pengolahan Deposit Bahan Pustaka | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 Tahun untuk sheld list/ jajaran kendali selama masih berlaku |
| 12 | TU.03.02 | Buku Induk | | | | |
| | | - Buku induk koleksi | | Terbuka | | Sampai dengan tidak dipergunakan |
| B | RT | KERUMAHTANGGAAN | | | | |
| 1 | RT.01 | Perjalanan Dinas | | | | |
| | | - Memo pengajuan ST | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun |
| | | - ST dan SPPD | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun |

| | | | | | | |
|----------|-----------|--|--|--|----------|----------------|
| | | - Pengurusan visa/paspor/surat setneg | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun |
| 2 | RT.02 | Surat Perintah Kerja Lembur | | | | |
| | | - Memo permohonan penerbitan SPKL | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun |
| 3 | RT.03 | Surat Keterangan | | | | |
| | | - Memo permohonan penerbitan Surat Keterangan | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun |
| 4 | RT.04 | Pemeliharaan | | | | |
| | | - Memo pengaduan kerusakan | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun |
| | | - Laporan perbaikan peralatan kantor | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun |
| | | - Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, pertamanan, instalasi listrik, air, alat pendingin ruangan (AC), lift, kendaraan dinas, peralatan telekomunikasi, peralatan kantor dan mesin diesel/generator serta penambahan daya berserta lampirannya | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun |
| 5 | RT.05 | Transportasi | | | | |
| | | - Memo permohonan penggunaan kendaraan | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun |
| | | - Daftar pemegang kendaraan operasional | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun |
| | | - Laporan pemeliharaan kendaraan dinas | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun |
| 6 | RT.06 | Fasilitasi Kegiatan | | | | |
| | | - Memo permohonan konsumsi, ruangan dan perlengkapan | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun |
| 7 | RT.07 | Ketertiban dan Keamanan | | | | |
| | | - Daftar Piket | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun |
| | | - Laporan pelaksanaan pengamanan kantor/gedung/rumah dinas dan pejabat | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun |
| 8 | RT.08 | Daftar Nama dan Alamat Pejabat | | | | |
| | | - Daftar Nama dan Alamat Pejabat | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama berlaku |
| C | PT | PROTOKOL | | | | |
| 1 | PT.01 | Kunjungan Kenegaraan | | | | |
| | | - Buku tamu | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan | | Tertutup | 1 tahun |
| 2 | PT.02 | Kunjungan Biasa | | | | |
| | | - Buku tamu | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan | | Tertutup | 1 tahun |

| | | | | | | |
|----------|-----------|-----------------------------------|--|---------|----------|---------|
| 3 | PT.03 | Upacara | | | | |
| | | - SK Petugas Upacara | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun |
| | | - Daftar petugas upacara | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun |
| 4 | PT.04 | Rapat Pimpinan | | | | |
| | | - Undangan | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun |
| | | - Daftar hadir | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun |
| | | - Risalah Rapat | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun |
| 5 | PT.05 | Rapat Biasa | | | | |
| | | - Undangan | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun |
| | | - Daftar hadir | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun |
| | | - Risalah Rapat | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun |
| 6 | PT.06 | Acara Kedinasan | | | | |
| | | - Permohonan pelaksanaan kegiatan | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun |
| | | - Permohonan Narasumber | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun |
| | | - Undangan | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun |
| | | - Daftar hadir | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun |
| | | - Laporan kegiatan | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun |
| 7 | PT.07 | Ucapan | | | | |
| | | - Ucapan selamat | | Terbuka | | 1 tahun |
| | | - Ucapan bela sungkawa | | Terbuka | | 1 tahun |
| D | PL | PERLENGKAPAN | | | | |
| 1 | PL.01 | Analisa Kebutuhan | | | | |
| | | - Memo Rencana Kebutuhan BMN | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun |
| | | - Laporan BMN | | Terbuka | | 1 tahun |
| | | - Daftar Aset | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun |

| | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------------|--|---------|----------|---|
| | | - SK Penetapan Rencana Kebutuhan BMN | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun |
| 2 | PL.02 | Pengadaan Barang dan Jasa | | | | |
| 3 | PL.02.01 | Barang | | | | |
| | | - Pengumuman Lelang | | Terbuka | | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - Surat Permintaan Penawaran Harga | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - BA. Penjelasan Lelang | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - BA. Evaluasi Teknis | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - BA. Evaluasi Penawaran | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - SK Pemenang | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - BA. Hasil Lelang | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - HPS | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - Memo persetujuan PA/KPA | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |

| | | | | | | |
|---|----------|--|--|---------|----------|---|
| | | - RUP | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - Dok. Pengadaan | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - SPPBJ | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - Kontrak | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - BAST | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - Laporan Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) | | Terbuka | | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| 4 | PL.02.02 | Jasa | | | | |
| | | - Pengumuman Lelang | | Terbuka | | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - Surat Permintaan Penawaran Harga | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - BA. Penjelasan Lelang | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - BA. Evaluasi Teknis | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|--|----------|---|
| | | - BA. Evaluasi Penawaran | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - SK Pemenang | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - BA. Hasil Lelang | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - HPS | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - Memo persetujuan PA/KPA | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - RUP | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - Dok. Pengadaan | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - SPPBJ | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - Kontrak | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| | | - BAST | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |

| | | | | | | |
|----|----------|--|--|---------|----------|---|
| | | - Laporan Kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) | | Terbuka | | 2 tahun setelah UU tentang pertanggung jawaban ABN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai |
| 5 | PL.03 | Hibah dan Peminjaman | | | | |
| 6 | PL.03.01 | Hibah | | | | |
| | | - Surat Permohonan Hibah | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah barang dipindah tangankan |
| | | - Surat Persetujuan dari Pengelola Barang | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah barang dipindah tangankan |
| | | - SK. Hibah dari Pengguna Barang | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah barang dipindah tangankan |
| | | - BA. Hibah | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah barang dipindah tangankan |
| 7 | PL.03.02 | Peminjaman | | | | |
| | | - Surat Permohonan Peminjaman | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama masa peminjaman |
| | | - Surat Persetujuan dari Pengelola Barang | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama masa peminjaman |
| | | - SK. Peminjaman dari Pengguna Barang | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama masa peminjaman |
| | | - BA. Peminjaman | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama masa peminjaman |
| | | - Surat Perjanjian Peminjaman | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama masa peminjaman |
| 8 | PL.03.03 | Sewa | | | | |
| | | - Surat Permohonan Sewa | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama masa penyewaan |
| | | - Surat Persetujuan dari Pengelola Barang | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama masa penyewaan |
| | | - SK. Sewa dari Pengguna Barang | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama masa penyewaan |
| | | - BA. Sewa | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama masa penyewaan |
| | | - Surat Perjanjian Sewa | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama masa penyewaan |
| 9 | PL.04 | Penatausahaan Barang Milik Negara | | | | |
| 10 | PL.04.01 | Aset Tetap | | | | |

| | | | | | | |
|----|----------|---------------------------------------|--|--|----------|--|
| | | - BAST | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah serah terima |
| | | - Tanda terima BMN | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah serah terima |
| | | - DIR | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah serah terima |
| | | - DAST | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah serah terima |
| | | - Daftar Aset | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah serah terima |
| 11 | PL.04.02 | Aset Lancar | | | | |
| | | - BAST | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah serah terima |
| | | - Tanda terima BMN | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah serah terima |
| | | - DIR | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah serah terima |
| | | - DAST | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah serah terima |
| | | - Daftar Aset | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah serah terima |
| | | - Buku Persediaan | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 1 tahun setelah serah terima |
| 12 | PL.04.03 | Kepemilikan | | | | |
| | | - Buku Inventaris | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 5 tahun sampai dengan dihapuskan/dipindahtangankan |
| | | - Bukti-bukti kepemilikan seperti : | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 5 tahun sampai dengan dihapuskan/dipindahtangankan |
| | | - a. Sertifikat kepemilikan kendaraan | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 5 tahun sampai dengan dihapuskan/dipindahtangankan |
| | | - b. Sertifikat tanah dan bangunan | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 5 tahun sampai dengan dihapuskan/dipindahtangankan |
| | | - c. HAKI | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 5 tahun sampai dengan dihapuskan/dipindahtangankan |

| | | | | | | |
|----|----------|--------------------------------|--|--|----------|----------------------|
| 13 | PL.04.04 | Perizinan | | | | |
| | | - IMB | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama masih berlaku |
| | | - Perizinan penggunaan gondola | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | Selama masih berlaku |
| 14 | PL.05 | Penghapusan | | | | |
| 15 | PL.05.01 | Aset Tetap | | | | |
| | | - Usulan penghapusan BMN | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 5 tahun |
| | | - Surat Izin Penghapusan BMN | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 5 tahun |
| | | - SK. Penghapusan BMN | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 5 tahun |
| | | - BA. Pemusnahan | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 5 tahun |
| 16 | PL.05.02 | Aset Lancar | | | | |
| | | - Usulan penghapusan BMN | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 5 tahun |
| | | - Surat Izin Penghapusan BMN | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 5 tahun |
| | | - SK. Penghapusan BMN | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 5 tahun |
| | | - BA. Pemusnahan | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang | | Tertutup | 5 tahun |